

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tinjauan pustaka mengenai pengertian pajak, dasar hukum pemungutan pajak burung walet, pengertian efektivitas, pengertian kontribusi, fungsi pajak, jenis pajak, syarat pemungutan pajak, subjek dan objek pajak burung walet. Dasar pengenaan pajak, nilai jual, tarif dan saat terutang pajak burung walet. Prosedur perhitungan pajak burung walet. Dalam pengertian pajak terdapat dalam kamus besar dan pengertian secara umum serta menurut pendapat para ahli. Dan untuk dasar hukum pemungutan pajak burung walet diatur dalam Undang-Undang tentang pajak daerah dan peraturan daerah, kemudian dalam skripsi ini membahas mengenai efektivitas dan kontribusi sehingga harus perlu mengetahui fungsi pajak, jenis pajak dan syarat pemungutan pajak burung walet, subjek dan objek pajak burung walet. Dasar pengenaan pajak, nilai jual, tarif dan saat terutang pajak burung walet. Prosedur perhitungan pajak burung walet.

A. Tinjauan Tentang Pajak

- 4 landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Pendekatan manfaat ini mendasarkan suatu falsafah: oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga

negara yang berdiam dalam negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan²³

1 Pengertian Pajak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk Negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang yang perdagangkan.²⁴

Secara umum, pajak ialah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara didalam menjalankan pemerintahan.²⁵

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan definisi pajak menurut para ahli di antaranya:

- a. Dr. Wahab al-Zuhaily mengatakan pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna menunjukkan jenis pungutan yang diambil oleh pemerintah (penguasa) dari rakyatnya, baik berupa pungutan dari pemilikan atas tanah, pengelolaan tanah, atau pun sumber- sumber lainnya.²⁶

²³ Ekhardhi, *landasan-filosofis-dan-asas-asas*. <http://ekhardhi.blogspot.com> 8mei 2019

²⁴ Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. Ke-1, h

²⁵ Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 1

²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatun*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Jus. V, h. 532

- b. Prof. Dr. MJH Smets mendefenisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.²⁷
- c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, (Guru Besar pada Universitas Pelajaran Bandung) dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat,” mendefenisikan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁸
- d. Prof. Dr. PJA Andriani mendefenisikan pajak ialah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah.²⁹

Dari beberapa jenis definisi yang dikemukakan para ahli diatas, dapat di ketahui bahwa unsur pajak mencakup:

²⁷ Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, h. 19-20

²⁸ Sudarsono, Aturan Bea Materai dan Kebijaksanaan Pajak, (Jakarta: PT. Rineca Cipta, 1994), Cet. Ke-1

²⁹ Bohari, Op. cit, h. 19

- 1) Pungutan oleh pemerintah
- 2) Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum
- 3) Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak
- 4) Pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita
- 5) Hasilnya digunakan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang tujuannya untuk keperluan masyarakat

Unsur Unsur dalam definisi pajak ;

- a. Iuran rakyat kepada negara,yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang.
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timba atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.³⁰

³⁰ Perpajakan.*Definisi Pajak*. <http://hukum-pajak.blogspot.com> acces 8 mei 2019

2 Dasar Hukum Pajak

Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindaklanjut dari bunyi pasal 23A UUD 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tatacara penyelenggaraan perpajakan. Setidaknya terdapat 8 (delapan) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

- a. UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan :
DIGANTI dengan UU No. 16/2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- b. UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan/ UU PPh : diganti dengan UU No. 17/2000
- c. UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahah Nilai atas Barang dan Jaqsa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, UU PPN/ PPn BM, DIGANTI dengan UU No. 18/2000
- d. UU No. 12/1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan, UU PBB, DIGANTI dengan UU No. 12/1994
- e. UU No. 19/1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPSP, DIGANTI dengan UU No. 19/2000
- f. UU No. 21/1997 Tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan, UU BPHTB, DIGANTI dengan UU No. 20/2000
- g. UU Pengadilan Pajak, UU PP, UU No. 14/2002

h. UU Bea Materai, UU BM, UU No. 13/1985³¹

3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut.

- a. *Equality* Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya. yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
- b. *Certainty* Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya³²
- c. *Convenience of payment* Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat~ dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak

³¹ Mengenal Pajak. *Dasar Hukum Pajak*. <https://www.muhammadyamin.com> acces 12mei 2019

³² Surtan siahan. *asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia*, <https://www.online-pajak.com/> acces 12 mei 2019

- d. Economic qfcollections Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seeiisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.³³

4 Sumber Penerimaan Pajak

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea materai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang–undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.³⁴

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

³³ ibid

³⁴ Surtan siahan. *sumber-pendapatan-negara*. <https://www.online-pajak.com/> acces 12 mei 2019

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.³⁵

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

³⁵ ibid

d. Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan³⁶

5 Fungsi Pajak

Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu:

- 1 Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia didalam kas Negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara.
- 2 Fungsi Regularend (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.³⁷

6 Jenis Pajak

Pajak biasa dilihat dari segi golongan, sifat, dan lenbaga pemungutan pajak dibagi kepada:

³⁶ Hestanto. *Penerimaan pajak*. <https://www.hestanto.web.id/> acces 12mei 2019

³⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), Cet. Ke-5, hal. 1

a. Menurut Golongannya:

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penambahan nilai.

Sementara itu, dari segi sifatnya, pajak dibagi pula menjadi:

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Sedangkan menurut lembaga pemungutnya dibagi kepada:

- a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membayai rumah tangga Daerah

pajak Daerah dibedakan atas dua yaitu pajak yang dipungut oleh propinsi misalnya pajak kendaraan bermotor, kendaraan diatas air, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu pajak yang dipungut oleh oleh Kabupaten/ kota misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.³⁸

b. Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah

1. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d. Bea Materai
2. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:

Pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1 Pajak Hotel.

³⁸ Ibid, h. 5-6

- 2 Pajak Restoran.
- 3 Pajak Hiburan.
- 4 Pajak Reklame.
- 5 Pajak Penerangan Jalan.
- 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- 7 Pajak Parkir.
- 8 Pajak Air Tanah.
- 9 Pajak Sarang Burung Walet.
- 10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- 12 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)³⁹

7 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo adalah Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : ⁴⁰

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil

³⁹ Surtan Siahan, pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjasannya ,<https://www.online-pajak.com/> acces 20 mei 2019

⁴⁰ Surta Siahan, syarat pemungutan pajak ini pengertian dasar hokum dan penjelasannya <https://www.online-pajak.com/acces> 12mei 2019

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”⁴¹

B. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

Pada masa sekarang ini dimana telah diterapkannya system otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, telah membuat suatu perubahan yang mendasar bagi system

⁴¹ ibid

pemerintahan yang dulunya menganut system sentralisasi menjadi system desentralisasi. dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu pemerintahan harus bersikap bijak dalam menetapkan PDA terutama mengenai pajak dan retribusi daerah, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama (bukan kepentingan orang-orang tertentu karena sebagian besar pendapatan merupakan berasal dari pajak). Dalam Kebijakan mengenai pungutan pajak daerah telah diatur berdasarkan Perda, yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak atas rokok, pajak atas minuman keras, pajak ekspor, pajak atas barang mewah dan sebagainya.⁴²

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

⁴² Abdul Majid. *Pernana pajak daerah*. <https://majidbsz.wordpress.com/> acces 12 mei2019

daerah dan pembangunan daerah.⁴³ Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasas sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.⁴⁴

2. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan pemerintahan, khususnya pembangunan. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak daerah mempunyai beberapa fungsi, antara lain⁴⁵

⁴³ Suandy, Erly. Hukum Pajak. Selemba Empat. 2011

⁴⁴ Sutedi, S.H., M.H., Andrian. Hukum Pajak. 2011. Sinar Grafika. Jakarta

⁴⁵ Klik Pajak. *Pngertian pajak daerah*, <https://klikpajak.id/> acces 12 mei 2019

a. Fungsi Anggaran

Pajak Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah Daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan Pajak Daerah. Melalui fungsi ini, dana dari Pajak Daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal, maka dapat diberikan keringanan pajak pada sektor tertentu. Dengan demikian diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak Daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.⁴⁶

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi

⁴⁶ Ibid

antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan⁴⁷

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya pajak dan retribusi daerah diatur juga oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan pajak dan retribusi daerah yang mencakup penambahan jenis pajak daerah⁴⁸

a. Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

⁴⁷ Cermati.com, *pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya*, <https://www.cermati.com>, acces 12 mei 2019

⁴⁸ Rezita Rani, *Pajak Daaerah*, <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah> acces 12 mei 2019

- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 5) Pajak rokok⁴⁹

b. Pajak Daerah Kota/ Kabupaten

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan dan Undang-undang terbaru telah disepakati ada 11 Pajak kabupaten kota yaitu:

- 1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut. bayaran termasuk bangunan lainiiya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran .
- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

⁴⁹ Ibid

- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.
- 5) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan⁵⁰
- 7) Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu tempat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8) Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air Tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
- 9) Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk Marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

⁵⁰Bapenda jabaar, *jenis-jenis pajak daerah*, <https://bapenda.jabarprov.go.id/> akses 12 mei 2019

10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajaka atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11) bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan⁵¹

4. Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

- a. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah:
 - 1) tanpa imbalan langsung yang seimbang;
 - 2) dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan

⁵¹ Finansialku. *Jenis pajak daerah*. <https://www.finansialku.com/> acces 12 mei 2019

- 3) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- d. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- e. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain:

- 1) objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi;
 - 2) pemungutannya;
 - 3) jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; dan
 - 4) tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
- h. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
- i. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.⁵²

C. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dengan kata lain. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai dari tahun 1999 membawa banyak perubahan dalam birokrasi Negara Indonesia. Perubahan itu ditandai dengan penggunaan istilah “Daerah Otonomi” untuk menyebut daerah yang artinya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

⁵² Kemenkeu. *Pajak Daerah*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> acces 12 mei 2019

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terjadi peralihan fungsi pemerintahan yang cukup signifikan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Daerah otonomi diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat karena dianggap lebih mengetahui keadaan daerahnya. Sehingga bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah dengan segera.

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi Daerah itu sendiri. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu Daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah sumber PAD terdiri dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD.⁵³

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah Daerah. Pajak

⁵³ Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak Kabupaten/kota.⁵⁴

2. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuann perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.⁵⁵

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.⁵⁶

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷ Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut

⁵⁴ Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

⁵⁵ Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁵⁶ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁷ Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.⁵⁸

3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal

⁵⁸ Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.⁵⁹

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. (Pasal 10)

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber

⁵⁹ Tips serbaserbi, *pengertian dan sumber sumber pendapatan asli daerah*
<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/> acces 12 mei 2019

pedapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu;⁶⁰

a. pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;

⁶⁰ ibid

- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;⁶¹

b. Retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”. Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;⁶²

⁶¹ ibid

⁶² Prima mawitjre, *Pendapatan Asli Daerah*, <https://primalifejournal.wordpress.com/> akses 12 mei 2019

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah

menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangan, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan⁶³

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan

⁶³ Ibid

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah⁶⁴

5. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.⁶⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia efektivitas adalah keberhasilan, mulainya peraturan, keadaan berpengaruh.⁶⁶

Hans Kelsen mendefinisikan tentang efektivitas hukum, sebagai Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.⁶⁷ Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁶⁸

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum

⁶⁴ Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Pendapatan asli daerah*.
<http://www.negarahukum.com/> acces 12mei2019

⁶⁵ Wikipedia. Efektivitas. [Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org). diakses 2 januari 2019.

⁶⁶ KBBI Online. Efektivitas. [Http://kbbi.web.id/efektivitas](http://kbbi.web.id/efektivitas). diakses 2 januari 2019.

⁶⁷ Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung. Nusa Media.Hlm.39

⁶⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁶⁹

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁷⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan

⁶⁹ Ibid. Hal. 8

⁷⁰ Ibid. Hal. 21

kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷¹

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat

⁷¹ Ibid. Hal. 37

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

6. Pengertian Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak Daerah (pajak sarang burung walet) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak Daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak Daerah terhadap PAD juga kecil.⁷²

D. Tinjauan Tentang Pajak sarang Burung Walet

Pada mulanya pengambilan sarang burung walet dilakukan pada habitat alam tempat sarang burung walet berada. Sarang burung walet diproduksi dari air liur burung walet itu sendiri, dan biasanya habitat alam yang menjadi hunian mereka adalah gua-gua yg bersisian di pinggir pantai. Di Indonesia sarang burung walet dapat ditemukan pada gua-gua pantai laut selatan. Pengambilan sarang burung walet kerap berisiko tinggi disebabkan pengambilannya dilakukan dengan peralatan sederhana pada posisi langit-langit gua di tengah debur ganas ombak laut selatan.

⁷² Shintia D. R. Saerang. 2017. Analisis efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan sistem ketetapan pajak serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota bitung. Jurnal EMBA Vol.5 No.2, Hal. 2286 - 2296

Namun pada era saat ini pemanfaatan sarang burung walet telah dapat dilakukan melalui metode penangkaran. Pada awalnya, beberapa burung walet ada yang secara liar membuat sarang burung walet di rumah-rumah warga. Setelah melihat prospek keuntungan dari hadirnya sarang burung walet di tengah kediaman mereka, maka para penangkar burung walet mulai serius dengan membuat bangunan yang akan menarik burung walet untuk membuat sarang di sana sehingga hasil dari penjualan tersebut dikenai Pajak.⁷³

1. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan sarang burung walet sendiri adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasar UU No.28 tahun 2009.

Sebelum berlakunya UU No.28 tahun 2009, pajak sarang burung walet dengan berbagai macam nama pada dasarnya telah banyak ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia. Pungutan atas budidaya burung walet dilakukan oleh berbagai kabupaten/kota dengan tegas menetapkan sebagai pajak daerah

Pengenaan pajak sarang burung walet tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan

⁷³ M.Lukman Hakim, Sarang Burung Walet, Pajakdaerah.blogspot.com.acces 8 Mei 2019

kewenangna yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet yang akan dijadikan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak sarang burung walet di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Siahaan mendefinisikan pemungutan pajak sarang burung walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet.
- c. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet pada Kabupaten/kota yang dimaksud.⁷⁴

⁷⁴ Siahaan, Marihot. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Rajawali Persada, Jakarta. Hal 522

3. Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak Daerah. Objek pajak adalah sesuatu yang menyebabkan timbulnya pajak dan digunakan sebagai acuan besarnya tarif pajak yang harus dibayar.

Subyek dan Objek pajak menurut Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak sarang burung walet adalah:

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.⁷⁵

4. Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pembayaran Pajak di lakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD kemudian Apabila pembayaran pajak di

⁷⁵ Peraturan Bupati kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak sarang burung walet

lakukan ditempat lain yang di tunjuk.hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh bupati dan Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran(TBP).⁷⁶

5. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

setiap wajib pajak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah selambat lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya,kecuali ditentukan lain Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka Dipenda akan mendaftarkan usaha WaJib Pajak secara jabatan, dalam hal Pendaftaran usaha, yang dimaksud disini adalah sebagai berikut :

- a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dipenda;
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan Fotocopy KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa ;⁷⁷

⁷⁶ ibid

⁷⁷ ibid

6. Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Jual, Tarif Dan Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan pajak, nilai jual, tarif dan saat terutang pajak sarang burung walet menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi dan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
2. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
3. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74. (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.⁷⁸

⁷⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi dan Daerah

7. Prosedur Perhitungan Pajak

Perhitungan satuan pengenaan pajak sarang burung walet adalah berdasarkan harga nilai jual sarang burung walet, nilai jual sarang burung walet yang dimaksud ialah dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume saang burung walet.

Traif pajaksarang burung waet ditetapkan 10%.⁷⁹

Bagan 1. Tarif Pajak Sarang Burung walet

No.	Kualitas Sarang Burung walet	Besar Nilai Jual	Tarif	Besarnya pungutan Pajak
1	Mangkok	12.000.00	10%	1.200.000,00
2	sudut	10.000.000	10%	1.000.000,00
3	Patahan	6.000.000	10%	600.000,00

⁷⁹ Peraturan Bupati kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak sarang burung walet